ETIKA PROFESI
AKUNTANSI
Kasdin Sihotang

ETIKA PROFESI AKUNTANSI

Kasdin Sihotang

PENERBIT PT KANISIUS

Sekapur Sirih

Menulis buku bukanlah pekerjaan yang gampang, apalagi kalau kegiatan ini dilakukan di tengah berbagai tugas yang dipercayakan oleh pimpinan. Selain membutuhkan konsentrasi dan keseriusan, pekerjaan ini menyita waktu yang banyak. Namun penulis sungguh percaya pada ungkapan, "di mana ada kemauan di situ ada jalan". Oleh karena keyakinan ini pulalah buku ini hadir di tangan pembaca.

Buku ini tidak mungkin terbit tanpa peranan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada mereka baik secara langsung terlibat maupun tidak. Yang pertama adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kehidupan saya, yakni istri, Sentiara boru Lumban Tungkup dan ketiga anak saya, Fransica Indriyani Nova boru Hotang, Laurensia Meida boru Hotang, dan Alfredo Frederikus Martua Sihotang. Penulis sungguh merasakan dukungan mereka yang diperlihatkan melalui sikap tidak mengeluh ketika waktu bersama mereka tersita oleh kesibukan menyelesaikan naskah buku ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Drs. Andre Ata Ujan, Ph.D., atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk mengampu Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi di Program Studi Akuntansi dan di Program Pendidikan Profesi Akuntansi. Kesempatan ini mendorong penulis untuk menggali dan mengembangkan

pemikiran serta ide-ide cemerlang bagaimana menyiapkan calon-calon akuntan yang bermutu di tengah masyarakat. Yang juga tidak dilupakan oleh penulis adalah Koordinator Etika Bisnis dan Profesi, Dr. Alexander Seran tahun 2014-2015. Kendati telah menyusun Satuan Acara Perkuliahan di setiap semester, namun Dr. Alexander Seran memberikan kebebasan penuh kepada dosen untuk mengembangkan materi. Hal ini juga menjadi pendorong dan mempercepat penyelesaian penulisan buku ini.

Sumbangan rekan-rekan dosen di Unit Pelaksana Teknis Mata-kuliah Pengembangan Kepribadian (UPT MPK) tidak bisa dilupakan oleh penulis melalui diskusi-diskusi informal di ruang dosen. Diskusi demikian turut memperkaya isi buku ini. Pihak lain yang turut menyumbang ide adalah para mahasiswa. Mereka juga menambah khazanah buku ini melalui diskusi intensif di kelas dan tugas-tugas yang mereka buat. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka.

Akhirnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Penerbit Kanisius yang telah bersedia menghadirkan buku ini ke publik. Ide-ide dalam buku ini hanya akan menjadi tumpukan kertas di atas meja, jika penerbit tidak menerbitkan buku ini.

Buku ini bukan karya sempurna, mengingat penulis juga bukan manusia sempurna. Untuk itulah penulis sangat mengharapkan masukan dari pembaca untuk semakin memberi bobot pada buku ini ke depan. Akhir kata, semoga kehadiran buku ini berarti bagi pembaca, khususnya bagi profesi akuntansi dalam mempertahankan keluhuran profesinya.

Selamat membaca!

Pendahuluan[1]

Kebangkrutan sebuah bisnis tidak saja disebabkan oleh krisis ekonomi, melainkan juga kemerosotan moral dalam mengelolanya. Salah satu contoh adalah Perusahaan Enron dan Arthur Andersen di Amerika Serikat. Perusahaan ini hancur justru karena mengabaikan moralitas. Pengabaian itu terlihat dalam manajemen dan praktik akuntansi yang tidak etis[2].

Penyimpangan dalam Tata Kelola

Dalam bisnis modern, sebagaimana ditegaskan oleh Richard Te De George, kelanggengan sebuah perusahaan sangat tergantung pada kualitas pengelolaan. Semakin baik pengelolaan dilakukan, semakin sehat perusahaan. Demikian sebaliknya, semakin buruk pengelolaan, semakin dekat kehancuran perusahaan.[3] Namun manajemen Enron kurang menyadari makna ungkapan ini dalam mengelola perusahaan.

Leonard J. Brook dan Paulin Dunn menyebutkan tiga prinsip tata kelola yang diabaikan oleh Enron, yakni akuntabilitas, transparansi,

---

1 Bdk. Kasdin Sihotang, "Urgensi Etika dalam Bisnis dan Akuntansi" dalam *Jurnal Etika,* Vol. 7, November 2015, hal. 120.

2 Bdk. Leonard J Brooks dan Paulin Dunn (2011), *Etika Bisnis & Profesi untuk Direktur, Eksekutif, dan Akuntan* Buku 1, terjemahan Kanti Pertiwi, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, hal. 91.

3 Bdk. Richard T de George (2003), *The Ethics of Information Techonolgy and Business*, United Kingdom: Blackwell, hal. 37.

dan *fairness*[4]. Terkait dengan akuntabilitas, ada lima penyimpangan besar yang dilakukan oleh Enron[5]. *Pertama,* minimnya upaya preventif Dewan Direksi yang menyebabkan berkembangnya tindakan sekelompok karyawan untuk memperkaya diri dengan berbagai cara.[6] Sesuai dengan tugas utamanya, Dewan Direksi mempunyai kewajiban fidusial, yakni meninjau strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan, memilih, dan memberikan kompensasi eksekutif senior perusahaan, mengevaluasi eksternal perusahaan dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan, serta memantau kinerja perusahaan secara keseluruhan[7]. Dewan Direksi juga bertanggung jawab untuk mengawasi lini bisnis dan strateginya, termasuk memastikan kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan untuk menjamin kepercayaan investor juga pemegang saham. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab besar manajemen perusahaan.

Namun semua fungsi *top management* di atas tidak diindahkan oleh Dewan Direksi Enron. Dewan Direksi justru mengembangkan sejumlah strategi bisnis yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, namun merugikan *stakeholders*. Dan menurut Doughlas M Branson, ini bertentangan dengan prinsip *Fiduciary Duty*.[8]

Kedua, adanya upaya menyembunyikan aset dan kewajiban dengan pendirian dan penggunaan kemitraan seperti Chewco, LJMI dan LJM2, yang ketiganya milik karyawan Enron sendiri. Perusahaan-perusahaan ini sering melakukan transaksi yang tidak dapat diatur secara independen dengan mengabaikan kejujuran dan aturan-aturan akuntansi di Amerika Serikat.

4 Bdk. Leonard J Brooks dan Paulin Dunn., *op.cit.,* hal. 84-121. Lihat juga Archie B. Carrol dan Ann K Buchholtz (2009), *Business & Society: Ethics and Stakeholder Management*, South-Western: Cengage Learning, hal. 122.

5 Bdk. Leonard J Brooks dan Paulin Dunn, *op.cit.,* hal. 88-89.

6 Fastow, perusahaan yang ditangani oleh karyawan Enron memperoleh uang sebesar $ 30 juta, dan Kopper mendapat $ 10 juta (Bdk. Leonard J Brooks, *op.cit.,* hal. 87).

7 Bdk. Joseph W Weis (2000), *Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach*, South Western: Thomson, hal. 140.

8 Bdk. Douglas M Branson (1993), *Corporate Governance*, Virginia: The Michie Company, hal. 32.

Ketiga, terjadinya transaksi yang tidak semestinya dengan jumlah begitu besar yang implikasinya sangat signifikan bagi kondisi keuangan Enron. Hal ini dilakukan sebagai upaya memberi kesan positif terhadap kondisi keuangan Enron, padahal sesungguhnya situasinya tidak demikian.

Keempat, terjadinya perlakuan yang salah terhadap akuntan. Enron membayar Arthur Andersen dengan begitu mahal untuk mengaudit perusahaan Chewco dan LJMI, namun fungsi advisorialnya tidak berjalan, karena nasihat Athur Andersen tidak dijadikan sebagai dasar pelaporan keuangan. Sebaliknya Enron membayar Arthur Andersen dengan tarif yang begitu mahal agar kekeliruannya tidak dibongkar.

Kelima, eliminasi prinsip independensi pemilik perusahaan untuk membuat sebuah investasi ekuitas substantif sekurang-kurangnya 3 persen dari aset *special purpose entities* (SPE) dan 3 persen sebagai berisiko di seluruh transaksi serta independensi melakukan pengendalian terhadap SPE[9].

Selain hampanya akuntabilitas, ketiadaan transparansi menjadi sebab kedua hancurnya Enron. Informasi materi perusahaan yang akurat dan tepat waktu antara lain meliputi situasi keuangan, kinerja perusahaan, manajemen perusahaan serta faktor risiko yang mungkin timbul merupakan kerangka kerja *corporate governance.* Namun Enron secara sadar mengabaikan prinsip ini dalam laporan keuangan. Yang dilakukan justru menghilangkan dokumen transaksi keuangan secara luas untuk menutupi keburukannya[10]. Upaya ini adalah menghindari pertanggungjawaban keuangan yang

---

9 Kondisi ini harus dipenuhi menurut aturan akuntan AS agar Enron bisa mencatat keuntungan dan kerugian transaksi dengan SPE serta aset dan kewajiban SPE tidak dimasukkan dalam neraca Enron walaupun Enron dan SPE berkaitan erat (Bdk. Mark Cheffers dan Michael Pakaluk [2007], *Understanding Accounting Ethics*, Massuchette: Allen Davis Press, hal. 91-94).

10 Dalam tata kelola perusahaan, laporan keuangan yang transparan mempunyai korelasi dengan tingkat kepercayaan para investor dan pemegang saham. Di negara-negara maju, para investor bersedia memberi premium yang cukup tinggi kepada perusahaan yang menerapkan prinsip transparansi dengan konsisten (Bdk. Adrian Sutedi [2011], *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 57).

akuntabel. Untuk mendukung tercapainya tujuan itu, kebebasan auditor internal perusahaan pun dibungkam[11].

Prinsip tata kelola lain yang dilanggar oleh Enron adalah *fairness*. *Fairness* berkaitan dengan keadilan. Secara sederhana, dalam ungkapan Romawi, keadilan adalah *tribuere cuique*, artinya memberikan apa yang menjadi hak orang[12]. Demi keadilan seyogianya hak dan kewajiban semua pemangku kepentingan diatur. Dengan kata lain, hak legal, hak ekonomis, dan hak moral serta kewajiban-kewajiban seperti ketaatan, konfidensialitas dan loyalitas wajib diatur secara tegas[13]. Namun semua ini juga tidak mendapat perhatian dari manajemen Enron. Malah manajemen justru membuka peluang bagi karyawan dan mitra Enron untuk memperkaya diri dengan cara mudah. Peluang ini menguntungkan satu pihak, yakni mereka yang mempunyai hubungan dengan manajemen perusahaan dan mendapat kesempatan untuk itu, seperti karyawan, namun merugikan pihak lain, seperti pemegang saham dan investor.

Deviasi Etika Profesi Akuntansi

Selain pengelolaan yang tidak sehat, penyimpangan nilai-nilai etis profesi akuntansi merupakan penyebab lain kehancuran Enron. Penyimpangan ini dilakukan oleh Arthur Andersen (AA)[14]. Sebagai lembaga audit keuangan ternama, AA seharusnya bertindak secara profesional, dalam arti melakukan audit berdasarkan standar

---

11 Bdk. Ronald F Duska dan Brenda Shay Duska (2006), *Accounting Ethics,* USA: Blacwell Publishing, hal. 107.

12 Bdk. K Bertens (2000), *Pengantar Etika Bisnis,* Yogyakarta: Kanisius, hal. 86.

13 Yang dimaksudkan dengan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan kesejahteraan secara ekonomis meliputi hak mendapatkan gaji atau upah yang adil, hak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dan hak mendapatkan bagian bonus atau insentif karena prestasi. Hak hukum berarti hak untuk diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma hukum yang berlaku dalam perusahaan. Sementara hak moral adalah hak atas kebebasan suara hati, hak atas rahasia pribadi dan hak atas perlakuan yang sama. Termasuk dalam hak moral adalah melaporkan kecurangan perusahaan, termasuk *whistle blowing* (Bdk. K. Bertens, *op.cit.,* hal. 170-179).

14 Dalam kasus ini World.Com juga mempunyai andil bagi kehancuran Enron. Namun penulis membatasi diri pada Arthur Andersen saja, karena menurut penulis Arthur Andersen sudah mereprentasikan pelanggaran etis dalam bidang akuntansi.

formal audit dan prinsip-prinsip etika profesi akuntansi[15]. Namun AA tidak melakukan hal itu.

Secara garis besar, ada empat prinsip etis profesi akuntansi yang dilanggar oleh AA[16]. *Pertama,* independensi. Sesuai prinsip independensi, akuntan tidak boleh tunduk pada kepentingan tertentu entah kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan auditee. Ia hanya tunduk para prinsip audit dan kepentingan umum[17]. Namun prinsip ini tidak diindahkan oleh AA. AA malah menerima kekeliruan yang dilakukan oleh Enron.[18] Hal lain yang bertentangan dengan independensi adalah jumlah akuntan AA yang menjadi auditor internal Enron[19].

Kedua, integritas. Integritas berkaitan dengan kualitas yang dengannya kepercayaan publik muncul, sekaligus menjadi ujian bagi pengambilan keputusan. Integritas merupakan ungkapan keutuhan pribadi dan keteguhan berpegang pada prinsip. Prinsip ini juga dilanggar oleh AA. AA tahu bahwa Enron telah melakukan penghilangan data penting berupa dokumen laporan keuangan. Auditor seharusnya mempertanyakan dan menggali mengapa manajemen Enron melakukan hal itu. Namun hal ini tidak dilakukan oleh AA. Artinya, AA mengabaikan fungsi utamanya, yakni memberikan pernyatan keuangan secara objektif, akuntabel dan dapat diverifikasi[20]. Di sini AA telah melakukan pelanggaran etika profesi akuntansi dan prinsip-prinsip audit[21].

---

15 Bdk. Mark Cheffers dan Michael Pakaluk, *op.cit.*, hal. 233.

16 Keempat prinsip ini akan diperdalam lagi dalam Bagian Lima.

17 Bdk. Michael Pakaluk dan Mark Cheffers (2011), *Accounting Ethics and the Near Collapse of The World's Financial System*, Massachusetts: Alen Daved Press, hal. 277.

18 Nanette Brynes menyatakan bahwa AA menerima dana sebesar $ 25 juta dari Enron dan jasa konsultas sebesar $ 27 juga yang implikasinya adalah AA membantu memperbaiki laporan keuangan dengan bayaran tambahan lebih dari $ 1 juta. (Bdk. Nanette Byrnes, *et al.,* "Publik Accounting in Crisis", dalam *Business Week*, January 28, 2002, hal. 46.)

19 Bdk Michael Pakaluk dan Mark Cheffers, *op.cit.,* hal. 276.

20 *Ibid.*, hal. 288.

21 Tentang ini Ronald F Duska dan Brenda Shay Duska menulis dengan jelas, "An Accountant should maintain objektivity and be free of conflict of interest in discharging proffesional responsibilities. He/ She should be independen in fact and apperance when providing auditing and other attestation services (Bdk. Ronald F Duska dan Brenda Shay Duska, *op.cit.,* hal. 85. Juga lihat Michael Pakaluk dan Mark Cheffers, *op.cit.,* hal. 288.)

Ketiga, objektivitas. Objektivitas adalah buah *independensi.* Prinsip ini memuat sikap imparsial, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan. Objektivitas berkaitan dengan kebenaran faktual, bukan pada penafsiran. Ini juga merupakan prinsip yang harus dipegang oleh seorang akuntan. Objektivitas diperlihatkan oleh akuntan dengan menempatkan data sebagai dasar untuk mengevaluasi dan menyimpulkan hasil auditnya[22]. Namun semua hal ini diabaikan oleh AA.

Secara objektif menurut Michael Pakaluk dan Mark Cheffers, ada tiga konsiderans yang dilanggar oleh AA. *Pertama,* fungsi untuk menyatakan kebenaran dengan memperlihatkan diri sebagai seorang peneliti berpendidikan. *Kedua,* fungsi melakukan verifikasi atas penemuan-penemuannya, dan *ketiga,* melayani kepentingan lain yang membutuhkan hasil pekerjaannya. Dalam hal ini eksistensi seorang akuntan adalah melayani, bukan mencari kepentingan diri atau melindungi diri.[23]

Prinsip keempat yang dilanggar oleh AA adalah tanggung jawab kepada publik. Ronald F. Duska menyatakan bahwa konsisten dalam menjalankan kewajiban untuk mempertahankan integritas, dan otonomi, serta kejujuran dalam memberikan pernyataan finansial merupakan wujud tanggung jawab akuntan kepada publik[24]. Kendati seorang akuntan mempunyai hubungan dengan kliennya, namun hubungan itu tetap dalam kerangka profesi. Dengan kata lain, hubungan auditor dengan klien bukanlah hubungan privat, melainkan hubungan profesional.

Pernyataan di atas memuat makna bahwa konflik antara kepentingan klien dengan kepentingan publik harus diatasi oleh seorang auditor dengan loyal pada prinsip-prinsip audit dan etika profesi. Seorang auditor tidak bertanggung jawab pada klien. Ia bertanggung jawab pada publik. Melihat hal ini, Ronald F. Duska

22 Bdk. Michael Pakaluk dan Mark Cheffers, *op.cit.,* hal. 102.
23 *Ibid.*, hal. 89.
24 Bdk. Ronald F Duska dan Brenda Shay Duska, *op.cit.,* hal. 113.

setuju dengan ungkapan Justice Burger yang menyatakan bahwa akuntan menjalankan "a public watchdog function"[25]. Namun hakikat tanggung jawab ini juga diabaikan oleh Arthur Andersen

Semua deviasi moral di atas membawa ekses yang tidak sedikit bagi reputasi dan eksistensi AA, yakni hilangnya kepercayaan publik dan terancamnya masa depannya[26].

Ekspektasi Publik atas Perilaku Etis

Kebangkrutan Enron dan hancurnya reputasi Arthur Andersen menjadi pelajaran yang berharga bagi dunia bisnis dan profesi. Peristiwa ini telah membangkitkan harapan dan kesadaran baru di kalangan pelaku bisnis maupun kaum profesional tentang pentingnya penerapan etika dalam mengelola korporasi serta menjalankan profesi. Peristiwa buruk demikian sekaligus menjadi antitesis bagi penganut mitos bisnis amoral[27] yang memisahkan bisnis dari etika. Dengan demikian, ungkapan Richard T. De George bahwa etika adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis dan menjadi lem yang merekatkan semua pihak yang terkait dalam bisnis[28] semakin luas diakui oleh masyarakat profesional.

Secara khusus dalam profesi akuntansi, pengakuan itu dipertegas dengan kehadiran dokumen bernama Sarbanes-Oxley Act (SOX). Selain menjadi landasan legal formal, SOX memberikan kejelasan tentang peran, tanggung jawab, dan keanggotaan subkomite audit

---

25 *Ibid.*, hal. 115.

26 Bdk. Ken McPhail dan Diane Walters (2009), *Accounting & Business Ethics*, London and New York: Roudledge Taylor & Francis Group, hal. 111.

27 Menurut Joseph W Weis, mitos bisnis amoral merupakan pandangan yang menyatakan bahwa penempatan etika dalam bisnis merupakan sebuah mitos. Ada lima argumen untuk menyatakan hal ini. *Pertama,* etika bersifat personal dan merupakan urusan pribadi, sehingga tidak relevan ditempatkan dalam lembaga bisnis. *Kedua,* etika dan bisnis tidak bisa dikaitkan karena keduanya mempunyai aturan dan bidang yang berbeda. *Ketiga*, etika bersifat relatif dalam arti tidak ada prinsip-prinsip yang bisa dijadikan sebagai standar yang sama. Situasi dan kondisi yang berbeda membuat tuntutan dan aturan berbeda. *Keempat,* etika sudah termuat dalam upaya menjalankan bisnis yang baik, karena itu bisnis yang baik sama dengan etika yang baik. *Kelima* informasi dan komputer adalah amoral, karena tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dari keduanya, dan bisnis berkecimpung dalam dua sarana ini (Bdk. Joseph W Weis [2006], *Business Ethics,* South Western: Benley Collage, hal. 14-28).

28 Tentang ini mengutip Richard De George, K Bertens mengatakan, "morality is the oil as well as the glue of society and therefore of business" (K. Bertens, *op.cit.,* hal. 379).

atas dewan. Di lain sisi juga mempertegas kedudukan subkomite audit yang secara langsung bertanggung jawab atas janji, kompensasi, dan pengawasan, serta tugas-tugas subkomite audit. Secara khusus seperti membuat prosedur untuk menerima dan menanggapi keluhan terkait dengan akuntansi, audit, pengendalian internal, termasuk menetapkan prosedur yang memungkinkan karyawan mengajukan keluhan secara anonim, serta menyetujui setiap layanan yang diberikan oleh auditor.

Pendidikan sebagai Humanisasi

Penanaman nilai etis tidak terjadi dengan sendirinya. Internalisasi ini membutuhkan waktu dan wadah. Momen untuk itu ada dalam perjalanan hidup setiap pribadi. Masa pendidikan adalah bagian dari momen ini. Bahkan menurut Plato, momen ini sangat penting karena "dunia pendidikan merupakan wadah yang sangat tepat dalam pembentukan kualitas pribadi seseorang[29]". Dapat dikatakan, masa ini adalah momen humanisasi dan hominisasi[30]. Oleh karena itulah momen ini perlu dijadikan sebagai titik awal pembentukan kesadaran etis dengan menempatkan Etika Profesi sebagai bagian integral pengajaran bagi para calon akuntan.

Memang harus diakui bahwa pengajaran etika profesi tidak secara otomatis membuat peserta didik berperilaku etis, namun pengajaran ini membuka kesadaran mereka tentang apa yang baik dan buruk dalam profesi kelak. Dengan kemampuan ini, mereka dapat mengambil keputusan secara tepat serta mencari solusi atas masalah yang kelak dihadapi di lapangan. Jadi, Etika Profesi minimal memberi pengetahuan dan menjadi dasar bagi mereka untuk menilai baik buruknya suatu perbuatan. Dalam hal ini tepat

---

29 Bdk. Plato (2006), *Rebublic,* translated by Jhon Leweyln Davies dan David James Vaughan, Great Britain: Wordsworth Classics of World Literature, hal. 206.

30 Bdk. A Sudiardja, editor (2006), *Karya Lengkap Driyarkara,* Jakarta & Yogyakarta: Gramedia & Kanisius, hal. 366.

apa yang dikatakan oleh Socrates bahwa pengetahuan menjadi dasar bagi mahasiswa untuk memberi penilaian[31].

Isi Buku

Buku ini diberi judul *Etika Profesi Akuntansi*. Judul ini sudah secara jelas mengisyaratkan bahwa yang dibahas di dalamnya adalah prinsip-prinsip etika yang perlu dijalankan oleh para pekerja di bidang akuntansi. Buku ini terdiri dari lima bagian. Bagian Satu merupakan pengantar untuk mengenal bagaimana kedudukan akuntansi sebagai profesi dengan memperlihatkan tahapan perkembangan dalam skala global dan nasional. Bagian yang berjudul "Perkembangan Akuntansi sebagai Profesi" ini terdiri dari dua bab, yakni Bab I dan Bab II. Bab I mengantar pemahaman tentang hakikat profesi dan argumen-argumen yang memperteguh kedudukan akuntansi sebagai profesi. Bab II mengulas tahapan perkembangan pengakuan akuntansi sebagai profesi dengan dinamika sosial dan politik pada masanya.

Dalam Bagian Dua di bawah payung "Pengertian Etika (Profesi), Norma, dan Kode Etik" diperkenalkan pengertian etika dan prinsip-prinsip etika profesi pada umumnya. Bagian ini juga terdiri dari dua bab, yakni Bab III dan Bab IV. Dalam Bab III dijelaskan secara lebih komprehensif pengertian etika, perbedaan etika dari etiket, dan norma-norma yang melingkupi hidup manusia. Bab IV membicarakan secara khusus pengertian etika profesi dan prinsip-prinsip etis profesi secara umum serta pentingnya studi etika dalam profesi akuntansi.

Bagian Tiga berisikan paparan tentang berbagai perspektif etika. Bagian yang diberi judul "Berbagai Perspektif Normatif" ini terdiri dari lima bab, yakni Bab V yang mengulas etika egoisme, Bab VI yang berisikan paparan tentang utilitarisme, Bab VII yang membicarakan

31 Bdk. Hugh Trendennick & Harold Tarrant (2006), *Plato, Hari-hari Terakhir Socrates*, terj. Eleonora Brigita, Jakarta: Elexmedia Komputindo, hal. 1.

deontologi, dan Bab VIII yang fokus pembahasannya adalah etika keutamaan. Masing-masing bab diberi catatan kritis.

Bagian Empat memperluas wawasan tentang bagaimana mengambil keputusan etis dan unsur-unsur yang perlu diperhatikan di dalamnya. Bagian yang diberi judul "Proses Pengambilan Keputusan Etis" ini terdiri dari dua bab, yakni Bab IX yang mengulas pengertian keputusan etis dan unsur-unsur serta momen-momen yang penting diperhatikan dalam pengambilan keputusan etis dan Bab X yang berfokus pada penerapan berbagai perspektif normatif, yakni utilitarisme, deontologi, keadilan, dan etika keutamaan dalam pengambilan keputusan di bidang keakuntansian. Bagian Lima diberi judul "Prinsip-prinsip Etis Profesi Akuntansi". Judul ini mengisyaratkan bahwa fokus pembahasan pada bagian ini adalah sejumlah prinsip etis profesi akuntansi. Pada bagian ini ada enam prinsip etika yang diulas secara mendalam, yakni tanggung jawab yang menjadi pembicaraan dalam Bab XI, independensi di Bab XII, integritas dan objektivitas di Bab XIII, kepentingan publik dan konfidensialitas di Bab XIV.

Mei 2016

Penulis

Daftar Isi

Bagian Satu

Perkembangan Akuntansi sebagai Profesi

Pengakuan publik tentang kedudukan akuntansi sebagai profesi terjadi melalui proses yang cukup panjang. Dinamika sosial ekonomi dan politik menyertai serta meneguhkan pengakuan itu. Aneka dinamika itu akan menjadi pokok pembahasan Bagian Satu ini. Bagian ini terdiri dari 2 bab, yakni Bab I yang membicarakan pengertian profesi, ciri-ciri profesi serta argumen-argumen mendasari pengakuan akuntansi sebagai profesi, dan Bab II yang mengulas tahap-tahap pengakuan akuntansi sebagai profesi baik di tingkat global maupun nasional.

Bab I
Akuntansi Sebagai Profesi

Pengantar

Sebelum mendalami bagaimana kedudukan dan pentingnya etika bagi seorang akuntan, kita membicarakan lebih dahulu arti profesi dan kedudukan akuntansi sebagai profesi, serta berbagai implikasi dari pengakuan itu. Pembahasan dalam bab ini dibagi dalam empat butir. Butir *pertama* membicarakan pengertian profesi secara umum, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai ciri-ciri profesi di butir *kedua*. Dalam butir *ketiga* argumen yang mendukung kedudukan akuntansi sebagai profesi dan konsekuensi kedudukan tersebut dari sisi epistemologis dan dari sisi etis akan menjadi fokus uraian. Bab ini akan diakhiri dengan rangkuman di butir *keempat*.

A. Arti Profesi

1. Etimologi

Secara etimologis, kata "profesi" berasal dari bahasa Latin, "professio", yang kata kerjanya adalah "profitere". Dalam *Kamus Latin-Indonesia,* kata "professio" diartikan sebagai "(1) pernyataan di hadapan umum, permakluman, pengumuman, (2) laporan resmi tentang nama atau harta kekayaan, (3) pekerjaan, jabatan, keadilan dan hal mempunyai sesuatu sebagai pekerjaan/mata pencaharian, (4) kaul, ikrar, pengaku-

an dan pernyataan". Sedangkan kata "profitere", artinya "(1) menyatakan di hadapan umum: mengakui terus terang, mengumumkan atau mencanangkan, (2) mengakui dirinya, menamakan dirinya atau menjadikan sesuatu pekerjaannya sebagai sumber mata pencahariannya, (3) menjanjikan, menawarkan atau mewajibkan diri[1]".

Dari berbagai pengertian di atas, kata profesi memuat dua hal. *Pertama,* profesi berkaitan dengan pekerjaan dengan syarat-syarat tertentu. Konkretnya, "profesi" dimengerti sebagai "bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian dalam arti keterampilan atau kejuruan tertentu". Di sini pengertian profesi lebih cenderung dikaitkan dengan ketrampilan teknis. Seseorang disebut profesional apabila ia mampu menjalankan tugasnya sebagaimana yang dituntut. Dan kemampuan menjalankan tugas itu merupakan hasil belajar di bidang tertentu pula.

Kedua, profesi berkaitan dengan pengakuan di hadapan publik, yang dinyatakan dalam sebuah janji atau ikrar. Dalam pengertian ini, kata profesi tidak saja dikaitkan dengan kemampuan teknis, melainkan melebihinya. Profesi memuat sikap mental berupa komitmen yang kuat dalam menjalankan pekerjaan[2].

Dengan demikian profesi menuntut tekad dan kemauan untuk konsisten pada apa yang dinyatakan di depan publik. Karena itu I Wibowo menyatakan bahwa profesi berkaitan dengan komitmen yang teguh pada nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, kesetiaan, keseriusan kerja dan tanggung jawab yang besar[3]. Komitmen ini merupakan ungkapan tekad bulat seseorang untuk memegang kepercayaan publik atas dirinya

---

1 Bdk. Drs. K Prent CM, cs (1969), *Kamus Latin-Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 687.

2 Dalam tradisi religius Gereja Katolik, seseorang yang mau hidup membiara harus mengikrarkan kaul, yang disebut dengan profesi dan kaul itu harus dinyatakan di depan publik. Setelah mengikrarkan kaul, ia mengikatkan dirinya pada apa yang dijanjikan untuk dipenuhi.

3 Bdk. A Setyo Wibowo, "Platon dan Komitmen Profesi" dalam F Budi Hardiman (2016*), Filsafat untuk Para Profesional*, Jakarta: Kompas, hal 2-4.

dan ia mau menjalankan janji itu secara konsisten. Jadi, profesi memiliki arti yang lebih luas, tidak sekedar berkaitan dengan bayaran, melainkan kesetiaan untuk melayani kepentingan umum. Dengan pengertian ini, Ken McPhail dan Diane Walters mengaitkan esensi profesi pada kompetensi etis serta karakter.[4]

Dari uraian butir kedua terlihat dengan jelas bahwa selain berkaitan dengan kompetensi teknis, profesi mengisyaratkan legitimasi moral dan legitimasi sosial. Legitimasi moral termuat dalam komitmen dan tanggung jawab serta konsistensi dalam menjalankan janjinya. Legitimiasi sosial berkaitan dengan kepentingan masyarakat, tepatnya melayani kepentingan masyarakat, yang menurut Ken McPhail dan Diane Walters merupakan tujuan utama sebuah profesi[5].

Pada awalnya hanya ada tiga bidang pekerjaan yang diakui sebagai profesi, yakni bidang keagamaan, kesehatan, dan hukum. Dengan demikian hanya ada tiga pihak yang menyandang gelar profesi, yakni agamawan, dokter, dan pengacara/advokat. Tugas utama ketiganya adalah memberikan pelayanan kepada kepentingan publik dari sisi yang berbeda. Dokter memberikan pelayanan di bidang kesehatan, agamawan memberikan pelayanan di bidang rohani, dan pengacara atau advokat memberikan pelayanan di bidang sosial dengan tujuan menegakkan keadilan serta kebenaran[6]. Ketiga profesi di atas mengemban tugas yang luhur. Melihat keluhuran inilah Ken McPhail dan Diane Walters mengingatkan bahwa tidak semua pekerjaan bisa menyandang gelar profesi[7].

---

4 Bdk. Ken McPhail dan Diane Walters (2009), *Accounting & Business Ethics*, USA: Routledge, hal. 138-139.

5 *Ibid.*

6 Bdk. Mark Cheffers dan Michael Pakaluk (2007), *Understanding Accounting Ethics*, Massachusettsw: Allen Davis Press, hal. 30-32. Juga lihat Michael Pakaluk dan Mark Cheffers (2011), *Accounting Ethics*, USA: Allen Davis Press, hal. 187.

7 Bdk. Ken McPhail dan Diane Walters, *op.cit.,* hal. 139.

2. *Berbagai Terminologi*

Terkait dengan kata profesi, kita perlu membedakan empat istilah, yakni "profesionalisme", "profesionalitas", "profesionalisasi", dan "profesional". Menurut Ramayulis[8], "profesionalisme" mengacu pada komitmen anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya terus-menerus dan mencari metode yang pas untuk meningkatkan hasil kerjanya. "Profesionalitas" mengacu pada sikap anggota profesi dalam menjalankan pekerjaan dengan mengandalkan pengetahuan dan keahlian.

Sedangkan "profesionalisasi" berkaitan dengan proses atau upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan anggota dalam mencapai standar profesi tertentu. Jadi, "profesionalisasi" menunjuk pada rangkaian pengembangan. Sementara kata "profesional" menunjuk pada orang yang menyandang suatu profesi dan penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang dibedakan dengan amatiran.

B. Ciri-ciri Profesi

Setelah membicarakan pengertian profesi, sekarang kita membicarakan ciri-cirinya. Apabila kita mencermati pengertian di atas, di dalamnya sudah termuat sejumlah ciri utama profesi. Namun demi lengkapnya, baiklah kita melansir pandangan beberapa ahli tentang itu. Michael Pakaluk, yang merujuk pandangan Abraham Flexner menyebutkan sepuluh ciri utama profesi[9].

1. Memiliki kerja intelektual dengan tanggung jawab yang besar.
2. Mampu menggunakan ilmu pengetahuan dalam pekerjaan demi suatu tujuan praktis, namun luhur.
3. Menguasai teknik komunikasi yang diperoleh secara akademis.
4. Mampu mengelola diri sendiri.

8 Bdk. H Ramayulis (2013), *Profesi & Etika Keguruan*, Yogyakarta: Kalam Mulia, cet. Ke-7, hal. 30.
9 Bdk. Michael Pakaluk dan Mark Cheffers, *op.cit.*, hal. 190.